

Perkembangan PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018

Yosi Suryani¹, Rudy Rinaldy²

¹ Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Padang

²Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang

E-mail : yosisuryani@gmail.com¹, rinaldy_rudy@yahoo.com²

Abstract

An area has its own income, usually derived from the transaction process carried out in it. This is called an economic indicator. This economic indicator is used to see the rate of economic growth that has levels from national to regional. At the regional level, such as provinces, districts / cities and even sub-districts, this is known as the Gross Domestic Product (GDP). Because of its role as one of the main indicators in the economy, making this GDP automatically plays an important role. Therefore, the purpose of writing this article is to monitor economic developments that occur in the area, especially in Padang city as the capital of West Sumatra Province. The research method used is a qualitative method by describing the development of Padang City's GDP according to the field of business in 2014-2019 and conducting an analysis within a period of five years. The type of data used is primary data from the Regional Apparatus Organization in Padang and BPS as a source of secondary data. The results of the analysis illustrate that the economic structure of Padang city in 2018 is dominated by 4 sectors as seen from the distribution of the 2018 GDP percentage, namely; Large and Retail Trade, Car and Motorcycle Repair (16.91%), Transportation and Warehousing (16.73%), Manufacturing Industry (13.12%) and Construction (10.38%). These four sectors contributed 57.14% of the total 2018 GRDP which contributed to the 6.09% economic growth in Padang City. The fifth sector is Information and Communication by 6.97%.

Abstrak

Suatu daerah memiliki pendapatannya sendiri, biasanya berasal dari proses transaksi yang dilakukan di dalamnya. Hal tersebut disebut indikator perekonomian. Indikator ekonomi ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi yang memiliki tingkatan dari nasional hingga daerah. Pada tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten/kota bahkan kecamatan, hal itu dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena perannya sebagai salah satu indikator utama dalam perekonomian, membuat PDRB ini secara otomatis memegang peranan penting. Maka dari itu, tujuan penulisan artikel ini adalah memantau perkembangan ekonomi yang terjadi di daerah khususnya di Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggambarkan perkembangan PDRB Kota Padang menurut lapangan usaha tahun 2014-2019 dan melakukan analisis dalam jangka waktu lima tahun tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data primer dari Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang dan BPS sebagai sumber dari data sekunder. Hasil analisis menggambarkan bahwa struktur perekonomian Kota Padang tahun 2018 didominasi oleh 4 sektor yang dilihat dari distribusi prosentasi PDRB 2018, yaitu ; sektor Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,91%), sektor Transportasi dan Pergudangan (16,73%), sektor Industri Pengolahan (13,12%) dan sektor Konstruksi (10,38%). Keempat sektor ini menyumbang 57,14% dari total PDRB 2018 yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Padang 6,09%. Sektor kelima adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 6,97%.

Kata Kunci : PDRB, harga berlaku, lapangan usaha

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam

jangka panjang. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah. Sesuai dengan tujuan dari pembangunan ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan ketimpangan pembangunan wilayah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan ketimpangan wilayah tersebut, masalah ketimpangan pembangunan wilayah tidak hanya diselesaikan Pemerintah Daerah yang bergerak secara sendiri-sendiri, harus ada koordinasi antara Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan wilayah yang terjadi.

Menurut Sjafrizal (2018) peran pemerintah dalam perekonomian dapat dikategorikan dalam empat macam peran, yaitu peran alokasi, peran distribusi, peran stabilisasi dan peran dinamisasi. Salah satu peran pemerintah dalam perekonomian adalah kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah adalah salah satu dari bentuk kebijakan fiskal.

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah, karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah.

Kota Padang memiliki jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa (BPS Kota Padang, 2019) melakukan pembangunan ekonomi dari segala sektor. Perkembangan pembangunan ekonomi di Kota Padang yang cukup pesat selama lima tahun terakhir dari berbagai sektor dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Padang itu sendiri, sekaligus membawa perubahan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan PDRB Kota Padang Tahun 2017 mencapai 6,23%, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu diangka 6,22%. Pada Tahun 2018 lima sektor yang sangat berperan dalam pertumbuhan PDRB Kota Padang adalah : sektor Perdagangan, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Industri dan Pengolahan, sektor Konstruksi dan sektor Informasi dan Komunikasi.

Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Padang kedepannya diperlukan analisis terhadap PDRB Kota Padang lima tahun terakhir, yaitu tahun 2014-2018. Menurut data dari BPS Kota Padang (2019) terdapat fluktuasi pertumbuhan PDRB Kota Padang selama tahun 2014-2018. Untuk itu diperlukan analisis apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi terhadap PDRB Kota Padang selama lima tahun tersebut, apakah lima sektor tersebut masih merupakan sektor yang paling berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang atau ada sektor lain yang memiliki angka tidak dominan, namun perkembangannya sangat cepat dan perlu dijadikan sebagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Kota Padang.

1.2 Tujuan Penelitian

Pembangunan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan PDRB suatu daerah mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kota Padang yang memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan sektor-sektor prioritas perlu memperhatikan sektor pendukung lainnya untuk dijadikan sebagai salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai sektor yang berpotensi dijadikan sektor prioritas dalam meningkatkan PAD Kota Padang.

Artikel ini difokuskan pada analisis perkembangan PDRB Kota Padang selama lima tahun, yaitu tahun 2014-2019. Tujuannya adalah untuk mengetahui fluktuasi PDRB Kota Padang lima tahun tersebut, faktor penyebabnya dan sektor prioritas yang

harus terus dikembangkan serta sektor pendukung yang perlu ditingkatkan untuk menambah PAD Kota Padang.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Defenisi dan Konsep PDRB

Produk Domestik Regional Bruto, yang selanjutnya disebut PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi (merefleksikan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat) suatu daerah memiliki kaitan yang erat dengan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan di daerah tersebut. Peningkatan pendapatan masyarakat suatu daerah sebagai hasil dari terjadinya pertumbuhan ekonomi mendorong masyarakat untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi dan menyimpan tabungan. Dengan asumsi bahwa masyarakat menyimpan tabungannya di lembaga keuangan bank, dan masyarakat tersebut akan disalurkan oleh lembaga keuangan bank dalam bentuk investasi. Investasi dimaksud dilakukan oleh sektor bisnis dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi, misalnya pembangunan pabrik baru atau perluasan pabrik, mampu menciptakan lapangan kerja. Keadaan ini meningkatkan kesempatan bagi orang miskin untuk bekerja. Ketika orang miskin bekerja, maka mereka akan mengalami peningkatan pendapatan. Selanjutnya, akibat dari pendapatan yang meningkat, orang miskin dapat meningkatkan pengeluaran mereka untuk membeli barang dan jasa, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, maka kapasitas produksi tenaga kerja di suatu daerah menjadi meningkat. Kondisi ini selanjutnya mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini idealnya terus berlanjut sehingga suatu daerah terhindar dari permasalahan kemiskinan dan mampu mendistribusikan pendapatan kepada semua orang di dalam daerah tersebut (Sjafrizal, 2018).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (Sjafrizal, 2018). Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hekekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi, pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional dengan menggunakan model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2013). Sedangkan menurut BPS (2018) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Kuncoro (2013) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitikberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Nasution (2010) dalam Charmelia dan Rahman (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah Daerah, serta Tenaga Kerja. Menurut BPS (2018), salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB. Dari data PDRB ini berguna untuk (a) PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya, (b) PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun, (c) Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah, (d) Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, (d) Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Menurut Tarigan (2012), cara untuk menghitung angka-angka PDRB terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu (a) Pendekatan Produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), (b) Pendekatan Pendapatan, PDRB ialah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), (c) Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto.

2.2 Hubungan PAD, Tenaga Kerja, Inflasi, Belanja Daerah dengan PDRB

Dalam kebijakan desentralisasi fiskal, salah satu tujuan utamanya ialah untuk menciptakan suatu kemandirian daerah dalam mendorong pembangunan ekonominya dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat (UU No. 32 tahun 2004). Dalam hal ini berarti bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut, terkhusus melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apabila PAD mengalami peningkatan yang cukup besar maka ini akan berdampak pada dana yang dimiliki oleh daerah juga akan semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa akan meningkatkan kemandirian suatu daerah sehingga ini akan membuat daerah semakin berinisiatif dalam menggali potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan pertumbuhannya ekonominya. (Sjafrizal, 2018).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) dalam Putri dan Poerwono (2013) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Suatu kesempatan kerja akan tercipta ketika terjadi permintaan akan tenaga kerja pada pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang besar dalam jangka pendek bergantung pada besarnya efektifitas permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan substitusi antara tenaga kerja serta faktor produksi yang lain, elastisitas permintaan akan hasil produksi, dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lainnya. (Sjafrizal, 2018)

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan secara berkelanjutan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi (Sjafrizal, 2018). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja merupakan jembatan utama yang mengaitkan antara keduanya.

Selanjutnya inflasi secara umum merupakan suatu keadaan dimana perekonomian menunjukkan adanya kecenderungan dalam kenaikan tingkat harga secara umum atau secara bersama-sama. Inflasi tidak semuanya berdampak negatif pada perekonomian. Utamanya apabila terjadi inflasi ringan yakni inflasi dibawah 10%, inflasi ringan ini justru nantinya dapat mendorong terjadinya pertumbuhan perekonomian. Hal ini dikarenakan inflasi akan mampu memberi semangat bagi pengusaha untuk lebih dapat meningkatkan produksinya. Selain itu pengusaha akan lebih bersemangat untuk memperluas produksinya, hal ini terjadi karena ketika terjadi kenaikan harga maka pengusaha akan mendapat lebih banyak keuntungan. Peningkatan produksi ini juga akan memberi dampak positif lain yakni tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi dikatakan dapat berdampak negatif jika nilainya melebihi 10% (Mankiw, 2006).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Disain Penelitian

Disain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Di dalam kajian ini, disain penelitian yang dimaksud adalah melakukan analisis terhadap PDRB Kota Padang menurut lapangan usaha dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Hal pertama yang dilakukan adalah membandingkan setiap tahun tujuh belas sektor lapangan usaha selama lima tahun. Kemudian melakukan analisis faktor penyebab peningkatan atau penurunan setiap sektor lapangan usaha tersebut dan prediksi kedepannya perkembangan sektor lapangan usaha ini terhadap PDRB Kota Padang.

3.2 Variabel Penelitian

Di dalam kajian ini terdapat beberapa variabel yang diamati dan dianalisis, diantaranya adalah: PDRB menurut lapangan usaha dan pengeluaran/penggunaan, pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dan pengeluaran/penggunaan. Variabel ini dijadikan sebagai unit analisis dan diulas secara rinci.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk menganalisis PDRB Kota Padang adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Kota Padang. Data dikumpulkan dengan cara mengunduh berbagai publikasi yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik Kota Padang di laman instansi-instansi tersebut. Selain itu, data juga diperoleh dari Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang.

3.4 Asumsi-Asumsi

Dalam kajian ini terdapat beberapa asumsi, yaitu: (a) Nilai PDRB dengan harga konstan merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha, (b) Nilai PDRB dengan harga konstan untuk lapangan usaha tertentu merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha tersebut, (c) Nilai indeks harga konsumen (IHK) dapat mewakili nilai GDP deflator, (d) Investasi adalah total PMTB dan perubahan inventori, (e) Arah kebijakan dan strategi ekonomi makro nasional Indonesia dan Kota Padang tidak berubah, yakni kebijakan ekonomi selalu berprioritas pada lapangan usaha unggulan dan pembangunan infrastruktur, (f) Asumsi-asumsi makro ekonomi, khususnya inflasi, menunjukkan pergerakan yang stabil, (g) Tidak terjadi bencana alam dan tanah longsor, (h) Tidak terjadi alih fungsi lahan secara signifikan, (i) Hubungan pemberi kerja dan tenaga kerja kondusif, (j) Tidak terjadi arus migrasi secara besar-besaran, baik yang masuk ke Kota Padang maupun yang keluar Kota Padang.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis penelitian menggunakan berbagai cara. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Komariah dan Satori (2011) penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, gambaran tentang suatu wilayah atau kawasan, model fisik dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif dipilih dalam rangka memberikan gambaran dan perkembangan tentang PDRB Kota Padang serta penjelasannya dalam bentuk analisis. Dalam rangka memberikan deskripsi PDRB Kota Padang, penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, perumusan masalah. Kedua, penentuan variabel-variabel penelitian. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, analisis data. Kelima, pembahasan dan interpretasi hasil. Terakhir, simpulan dan saran kebijakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan PDRB Kota Padang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

PDRB Kota Padang menurut Lapangan Usaha dirinci menjadi 17 (tujuh belas) kategori Lapangan Usaha (Sektor) dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Tahun 2019, perkembangan PDRB menurut Lapangan Usaha dapat dipaparkan pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa PDRB menurut lapangan usaha Kota Padang untuk periode 2014 – 2018 yang diasumsikan ceteris paribus didominasi empat besar pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Industri dan Pengolahan dan Konstruksi. Struktur perekonomian Kota Padang tahun 2018 yang didominasi oleh empat sektor tersebut dapat dilihat dari distribusi prosentasi PDRB 2018, yaitu ; sektor Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,91%), sektor Transportasi dan Pergudangan (16,73%), sektor Industri Pengolahan (13,12%) dan

sektor Konstruksi (10,38%). Keempat sektor ini menyumbang 57,14% dari total PDRB 2018 yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Padang 6,09%.

Tabel 1. PDRB Per Kapita Kota Padang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.02	5.10	5.15	5.24	5.48
B	Pertambangan dan Penggalian	3.34	3.46	3.26	3.11	3.15
C	Industri Pengolahan	15.91	15.39	14.86	14.34	13.12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.1	0.1	0.11	0.1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14
F	Konstruksi	9.66	10.12	10.06	10.23	10.38
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.65	16.78	16.71	16.9	16.91
H	Transportasi dan Pergudangan	15.97	16.03	16.11	16.34	16.73
I	Penyediaan Akomodasi dan Minum Minum	1.17	1.29	1.38	1.45	1.45
J	Infomasi dan Komunikasi	6.98	6.35	6.38	6.71	6.97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.61	5.55	5.69	5.37	5.18
L	Real Estate	3.15	3.26	3.23	3.13	3.09
M	Jasa Perusahaan	1.45	1.49	1.5	1.46	1.46
N	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	6.63	6.23	6.27	6.27	6.39
O	Jasa Pendidikan	4.63	4.96	5.19	5.02	5.03
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.5	1.49	1.5	1.57	1.6
Q	Jasa Lainnya	2.16	2.27	2.44	2.58	2.73

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang (2019)

Dominasi empat sektor ini sudah berlangsung selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Keempat sektor ini terus menunjukkan performa meningkat, khususnya selama lima tahun yaitu Tahun 2014 - 2018. Hanya sektor Industri Pengolahan yang mengalami penurunan dari 15,91% (2014), 15,41% (2015), 14,90% (2016), 14,35% (2017), dan menjadi 13,12% pada Tahun 2018. Melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan ini berkontribusi pula kepada melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Padang, walau sektor-sektor diluar empat sektor tersebut semuanya menunjukkan kecenderungan mengalami percepatan, diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial, sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami perlambatan adalah ; sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor *real estate*. Pembahasan berikut ini menggambarkan lebih rinci.

4.1.1.Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alan dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) pada kegiatan usaha pangan. Kontribusi lapangan usaha ini di Kota Padang yang terus meningkat sampai tahun 2018 salah satunya disebabkan karena budidaya sektor perikanan di Kota Padang yang semakin banyak dan terus bertambah.

Sementara itu fungsi hutan terus dipertahankan sebagai lahan yang tidak boleh digunakan untuk keperluan lain dan diikat dengan peraturan yang jelas.

Namun dari sisi sektor pertanian dan kehutanan mengalami penurunan, karena salah satu penyebab adalah lahan pertanian di Kota Padang yang semakin sempit akibat alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan. Perkembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.2. Lapangan Usaha Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kategori sektor pertambangan dan penggalian meliputi pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan. Sedangkan Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, minyak dan gas bumi dan bahan radioaktif). Bahan galian ini biasanya digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong sektor industri maupun konstruksi. Hasil kegiatan penggalian antara lain, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat dan lain-lain (BPS Kota Padang, 2019).

Kota Padang tidak memiliki sektor pertambangan, namun sangat didukung oleh sektor penggalian, seperti batu kali, batu kapur, kerikil, pasir, tanah liat dan sebagainya. Dengan pertumbuhan sektor konstruksi yang lebih baik semenjak Tahun 2016, maka sektor penggalian juga mengalami percepatan yang baik. Diprediksi lima tahun ke depan sektor ini akan terus mengalami pertumbuhan percepatan seiring dengan meningkatnya pembangunan di Kota Padang, terutama perkembangan pembangunan konstruksi. Perkembangan sektor pertambangan dan penggalian Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.3. Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk kegiatan industri pengolahan lainnya. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan.

Termasuk dalam kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Salah satu yang berpengaruh besar terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor industri pengolahan yang terus mengalami perlambatan mulai tahun 2014.

Tahun 2019 Kota Padang memulai investasi pabrik CPO yang dilakukan oleh PT. Padang Raya Cakrawala dengan total perkiraan investasi sebesar sekitar Rp. 850 Milyar, yang merupakan penanaman modal dalam negeri. Industri pengolahan kepala sawit ini nantinya akan menghasilkan turunan lebih dari 10 (sepuluh) jenis yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Dengan pembangunan pabrik ini kinerja sektor industri pengolahan diharapkan akan menjadi lebih baik kembali apabila nanti pabrik ini sudah beroperasi, sehingga akan memberikan kontribusi positif bagi percepatan

pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada masa yang akan datang. Perkembangan sektor industri pengolahan di Kota Padang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.4. Lapangan Usaha Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Kontribusi lapangan usaha ini berdasarkan Tabel 1 dilihat mengalami kecenderungan konstan, mengingat listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat dan penggunaannya cenderung konstan sehingga tidak terjadi *shock* atau guncangan yang berarti dalam pengadaan listrik. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan diprediksi peningkatan penggunaan listrik dan gas pertambahannya 2% s.d 3%. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pembangunan konstruksi di Kota Padang yang terus bertambah, seperti hotel, café dan restoran. Perkembangan sektor pengadaan listrik dan gas di Kota Padang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.5. Lapangan Usaha Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kontribusi lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 adalah berfluktuasi. Sektor ini pada Tahun 2018 mengalami penurunan dari Tahun 2017, yaitu 0,01%. Pertumbuhan penduduk Kota Padang yang terus meingkat menyebabkan jumlah sampah dan limbah juga meningkat. Namun pengelolaan sampah dan limbah yang baik belum dilakukan dengan optimal, sehingga terjadi penumpukan sampah dan limbah tersebut. Demikian juga dengan daur ulang sampah yang belum dilakukan khususnya terhadap sampah-sampah rumah tangga, sehingga kenaikan volume sampah tiap tahunnya tidak diiringi dengan pengelolaan sampah dan daur ulang. Kondisi ini berdampak pada kondisi kerusakan lingkungan akibat penumpukan sampah tersebut.

Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, sektor pengadaan air di Kota Padang yang dikelola oleh PDAM tidak diiringi dengan penambahan sumber air yang baru dan pengelolaan mesin PDAM yang kurang baik dalam mendistribusikan air, mengakibatkan air bersih di Kota Padang sering tidak terdistribusi dengan lancar. Dengan kurangnya pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah serta minimnya dilaksanakan daur ulang terhadap sampah dan limbah mengakibatkan lapangan usaha ini terus bergerak turun, sampai dengan tahun 2018. Diprediksi lima tahun kedepan sektor ini konstan atau menurun. Perkembangan lapangan usaha sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Kota Padang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.6. Lapangan Usaha Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor lapangan usaha yang terus mengalami percepatan semenjak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Kota Padang. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya pembangunan fisik gedung seperti hotel, café, bangunan-bangunan pemerintah, pasar tradisional dan infrastruktur lainnya yang sedang giat dilaksanakan di Kota Padang.

Demikian juga dengan investasi sektor pariwisata bidang perhotelan, masih menjadi daya tarik utama bagi seluruh calon investor. Hal ini sejalan dengan begitu banyaknya event-event internasional, nasional, regional dan lokal yang dilaksanakan di Kota Padang, sehingga kebutuhan kamar hotel semakin meningkat. Oleh karena itu terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur fisik di Kota Padang dari 10,23% pada Tahun 2017 menjadi 10,38% pada Tahun 2018. Diprediksi sektor konstruksi ini akan terus mengalami peningkatan sebanyak 0,15% sampai dengan 0,30% lima tahun yang

akan datang. Perkembangan sektor lapangan usaha konstruksi Kota Padang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.7. Lapangan Usaha Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor ini merupakan sektor lapangan usaha yang paling tinggi di Kota Padang. Secara umum setiap tahun mengalami peningkatan angka persentasenya. Tahun 2014 tingkat persentase sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor adalah pada 16,65. Tahun 2015 mengalami peningkatan 0,13% menjadi 16,78%. Angka tersebut mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 16,71%. Namun Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,19% yaitu diangka 16,90% dan Tahun 2018 pada angka 16,91%.

Sektor ini berada pada tingkat presentase yang paling tinggi di Kota Padang disebabkan karena masyarakat Kota Padang merupakan masyarakat yang mempunyai mata pencaharian utama di sektor perdagangan terutama berwirausaha. Ketersediaan pusat perdagangan yaitu Pasar Raya dan pasar-pasar tradisional pembantu, toko-toko dan ruko-ruko yang semakin berkembang di Kota Padang menyebabkan sektor ini menyumbang persentase paling tinggi untuk PDRB Kota Padang. Diprediksi sektor ini akan menempati sektor paling tinggi beberapa tahun kedepan. Perkembangan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Padang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.8. Lapangan Usaha Sektor Transportasi dan Pergudangan

Sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor lapangan usaha yang menempati urutan kedua tertinggi berdasarkan persentase di Kota Padang. Selama jangka waktu lima tahun (2014-2018) sektor ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2014 sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Padang sebanyak 15,97%. Terjadi peningkatan menjadi 16,03% pada Tahun 2015 (0,06%). Sampai dengan Tahun 2019 angka yang dicapai adalah 16,73%, meningkat dari tahun 2017, yaitu sebesar 16,34%.

Sektor transportasi dan pergudangan memberikan angka yang cukup besar bagi pertumbuhan Kota Padang disebabkan karena jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun untuk dijadikan sebagai sarana pengangkutan. Kendaraan pribadi yang terus bertambah, terutama kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua merefleksikan bahwa terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi ini akan berdampak berkurangnya penggunaan transportasi umum seperti angkutan kota (angkot) dan beralih ke kendaraan pribadi tersebut. Namun permintaan terhadap kendaraan umum yaitu Bus Trans Padang justru terus meningkat.

Perpindahan transportasi masyarakat dari transportasi umum ke kendaraan pribadi berdampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Secara positif peningkatan penggunaan kendaraan pribadi diprediksi akan meningkatkan pendapatan retribusi parkir, namun secara negatif dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan pribadi akan berdampak pada kemacetan lalu lintas (menghambat distribusi/pengiriman barang dan jasa). Untuk itu pembangunan lapangan usaha ini perlu dilakukan terutama dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur jalan raya dan pengaturan setiap ruas jalan agar tetap kemacetan dapat dikendalikan.

Disamping itu peningkatan jumlah kendaraan besar di Kota Padang juga cukup signifikan, seperti truk pengangkut barang dan container. Kendaraan besar berfungsi untuk mengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat masuk dan keluar Kota

Padang. Peningkatan jumlah kendaraan besar ini mengindikasikan tingginya perputaran barang masuk dan keluar Kota Padang. Artinya tingginya permintaan barang dan tingginya penawaran barang atau penjualan barang ke luar Kota Padang. Dengan demikian lapangan usaha sektor transportasi juga meningkat. Pembangunan pergudangan di Kota Padang juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan sektor perdagangan yang semakin pesat yang membutuhkan sarana penyimpanan. Lokasi pergudangan yang semakin berkembang adalah sepanjang kawasan Bypass Kota Padang. Perkembangan sektor transportasi dan pergudangan di Kota Padang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.9. Lapangan Usaha Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pemerintah Kota Padang tengah giat mengembangkan pusat-pusat makanan dan kuliner, sehingga berdampak pada pertumbuhan di lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya peningkatan kontribusi sektor ini setiap tahunnya namun pada Tahun 2018 mengalami stagnasi. Tahun 2014 kontribusi yang disumbangkan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah 1,17%. Terjadi peningkatan pada Tahun 2015 menjadi 1,29% dan terakhir Tahun 2018 adalah angka 1,45%.

Peningkatan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ini belum terlalu besar untuk Kota Padang, namun selalu mengalami perkembangan yang baik setiap tahunnya. Diprediksi untuk tahun selanjutnya akan mengalami peningkatan karena Pemerintah Kota Padang terus menambah investasi di sektor ini dengan pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Padang, pembangunan hotel, restoran, café, yang akan mempercepat perkembangan lapangan usaha sektor ini. Perkembangan lapangan usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Padang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.10. Lapangan Usaha Sektor Informasi dan Komunikasi

Sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor yang berada pada peringkat kelima terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB Kota Padang dan mengalami percepatan dari tahun ke tahun. Kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi yang *ter-update*, membuat sektor ini menjadi salah satu sektor yang sangat diminati walaupun kontribusinya terhadap PDRB hanya sekitar 6,97% di Tahun 2018. Namun dengan peningkatan dari tahun ke tahun dengan tingkat persentase yang cukup tinggi menyebabkan sektor ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan sebesar 0,3% sampai dengan 0,5%. Pemerintah Kota Padang adalah *stake holders* yang terus membenahi sektor informasi dan komunikasi ini, diantaranya membenahi kualitas sarana dan prasarana komunikasi yang lebih baik dengan operator selular di Kota Padang. Hal ini juga disebabkan karena di era yang semakin maju, kehidupan masyarakat sangat sulit dipisahkan dari teknologi informasi seperti internet. Teutama di dunia pendidikan, proses pembelajaran mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi tidak bisa dilepaskan dari sarana teknologi informasi dan telekomunikasi.

Dengan kondisi peningkatan sektor ini yang semakin pesat menyebabkan pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Padang juga meningkat. Kebijakan untuk mendorong lapangan usaha informasi dan komunikasi akan berdampak pada peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang, yang pada tahun 2018 mencapai 82,25. Angka ini memposisikan Kota Padang memiliki IPM terbaik di Sumatera Barat dan nomor 6 (enam) terbaik se Indonesia setelah Kota Yogyakarta, Jakarta Selatan, Banda Aceh, Denpasar dan Sleman).

Perkembangan lapangan usaha sektor informasi dan komunikasi di Kota Padang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.11.Lapangan Usaha Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Kontribusi lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi di Kota Padang mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2014- 2018, walaupun pada Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,14%. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indeks Gini yang (IG Sumatera Barat September 2018 adalah 0,305). Dengan pendapatan per kapita yang meningkat tetapi tidak disertai dengan penurunan Indeks Gini, terjadi adanya celah ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan disebabkan oleh peningkatan pendapatan golongan atas, sehingga celah perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin diperkirakan semakin jauh. Hal ini memungkinkan golongan pendapatan rendah diprediksi tidak mengakses lembaga keuangan. Oleh karena itu, walaupun lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi merupakan indikasi urban sumbangannya diproyeksikan mengalami penurunan untuk tahun selanjutnya di Kota Padang.

Namun demikian, perumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi diperkirakan mengalami di Tahun 2019, sebesar 0,02% karena tersedianya lembaga keuangan syariah yang banyak mencari segmen sasaran masyarakat bertaraf hidup rendah dengan tingkat bagi hasil yang tidak memberatkan bagi masyarakat di Kota Padang dan beberapa progam lembaga keuangan lainnya bagi pemberdayaan UMKM. Hal ini menjadi signal positif untuk mengembangkan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi. Peningkatan akses masyarakat lembaga keuangan akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lapangan usaha ini adalah dengan melakukan program sosialisasi literasi keuangan, sehingga masyarakat berpendapatan rendah pun dapat mengakses lembaga keuangan.

Prediksi pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yang mengalami peningkatan Tahun 2019 memberikan signal daya beli yang meningkat. Peningkatan daya beli akan direspon oleh pelaku usaha dengan menambah kapasitas produksi. Penambahan kapasitas produksi membutuhkan investasi atau tambahan modal, sehingga diprediksi menjadi peluang penyaluran dana bagi lembaga keuangan. Perkembangan lapangan usaha sektor jasa keuangan dan asuransi Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.12.Lapangan Usaha Sektor Real Estate

Pertumbuhan lapangan usaha *real estate* di Kota Padang Tahun 2014 – 2019 menurun setiap tahunnya, walaupun pada Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,11% dari angka 3,15% pada Tahun 2014. Pada Tahun 2016 penurunan terjadi di angka 3,23%, dan di Tahun 2018 menurun menjadi 3,09% dari Tahun 2017 sebesar 3,13%. Penurunan sektor *real estate* di Kota Padang disebabkan karena Pemerintah Kota Padang mulai membatasi perkembangan *real estate* pada lokasi-lokasi yang bukan untuk peruntukannya, seperti peruntukan lahan pertanian. Disamping itu masyarakat Kota Padang 85% sudah memiliki rumah yang layak huni dan membeli rumah berikutnya hanya untuk investasi, sehingga permintaan terhadap *real estate* di Kota Padang cenderung mengalami penurunan.

Pada Tahun 2019 diprediksi belum adanya peningkatan sektor ini secara signifikan. Masyarakat Kota Padang lebih mengutamakan menggerakkan keuangannya pada sektor perdagangan dan jasa dengan modal yang lebih sedikit, dan hasil yang lebih menguntungkan dalam waktu yang pendek. Hal inilah yang menyebabkan tahun berikutnya sektor *real estate* masih berada di posisi penurunan atau mengalami stagnasi.

Perkembangan sektor *real estate* Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.13.Lapangan Usaha Sektor Jasa Perusahaan

Lapangan usaha jasa perusahaan memiliki andil terhadap perekonomian Kota Padang, melalui sumbangannya terhadap PDRB Kota Padang, walaupun angka yang disumbangkan tersebut adalah rendah. Kontribusi sektor jasa ini berfluktuasi selama periode 2014 – 2019. Selama dua tahun terjadi peningkatan sektor jasa perusahaan di Kota Padang, yaitu Tahun 2014 sebesar 1,45% menjadi 1,49% pada Tahun 2015. Peningkatan terus terjadi pada Tahun 2016 menjadi 1,5%. Namun pada Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,04% menjadi 1,46% dan akhirnya pada Tahun 2018 konstan diangka 1,46%.

Pemerintah Kota Padang harus terus menyupayakan terjadinya peningkatan terhadap sektor jasa perusahaan ini, karena dapat membantu pembangunan di Kota Padang. Upaya tersebut seperti peningkatan program CSR bagi perusahaan besar yang menyentuh masyarakat dan pelaku usaha UMKM, dan melibatkan perusahaan-perusahaan dalam aktivitas atau kegiatan yang mendukung program Pemerintah Kota Padang. Perkembangan lapangan usaha sektor jasa perusahaan Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.14.Lapangan Usaha Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

Kontribusi sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan social wajib di Kota Padang periode 2014 – 2019 adalah berfluktuatif. Tahun 2014 berada pada angka 6,63%, terjadi penurunan pada Tahun 2015 menjadi 2,23%. Namun pada Tahun 2016 ada peningkatan sebesar 0,04% diangka 6,27%. Tahun 2016 mengalami stagnasi dan Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 6,39%. Peningkatan angka pada sektor ini sampai dengan Tahun 2018 karena semakin tingginya tuntutan penyempurnaan sarana pelayanan administrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur. Penyempurnaan tersebut meliputi penyempurnaan segi kelembagaan, prosedur kerja, sarana kerja dan fasilitas kerja sehingga wajar apabila lapangan usaha ini diperkirakan memiliki kontribusi yang besar.

Upaya penyempurnaan sarana pelayanan administrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur tentunya juga diperkirakan berdampak pada tingkat inflasi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. Perkembangan lapangan usaha sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan social wajib Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.15.Lapangan Usaha Sektor Jasa Pendidikan

Sektor jasa pendidikan merupakan pengeluaran masyarakat yang digunakan untuk pendidikan. Dengan meningkatnya PDRB Kota Padang diharapkan pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan. Dengan peningkatan pendapatan per kapita maka akan meningkat pula porsi pendidikan untuk pengeluaran non makanan yang salah satunya adalah pengeluaran pendidikan. Kondisi ini diprediksi ikut menjadi pendorong sektor jasa pendidikan yang memiliki kontribusi yang cukup besar pada pembentukan PDRB Kota Padang.

Pada Tahun 2014 kontribusi jasa pendidikan Kota Padang adalah berada di angka 4,63. Pada Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,96%. Peningkatan terus terjadi di Tahun 2016 menjadi 5,19%, Namun pada Tahun 2017 mengalami penurunan

sebesar 0,17% yang berada diangka 5,02%. Dibandingkan dengan Tahun 2017, pada Tahun 2018 jasa pendidikan berkontribusi positif dengan terjadinya peningkatan sebesar 0,01% yang berada di angka 5,03%.

Kondisi flukatif sektor jasa pendidikan ini disebabkan karena peningkatan/penurunan kemampuan/pendapatan per kapita masyarakat Kota Padang dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan berdampak pada jasa pendidikan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Diprediksi untuk Tahun 2019 terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat di Kota Padang, karena turunnya Indeks Gini, sehingga jasa pendidikan juga akan mengalami peningkatan sebanyak 0,20%. Perkembangan sektor jasa pendidikan Kota Padang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.

4.1.16. Lapangan Usaha Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan social di Kota Padang mengalami percepatan yang baik dan signifikan selama periode 2014 – 2019. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5. Mulai Tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 0,02% dari angka 1,15% menjadi 1,57% di Tahun 2017. Peningkatan juga terjadi pada Tahun 2018 diangka 1,6%.

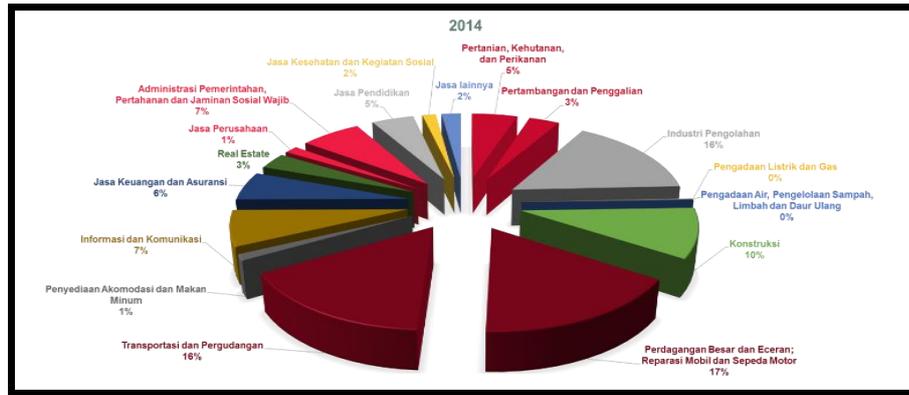
Peningkatan sektor jasa kesehatan dan kegiatan social yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun sebelumnya disebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan semakin mudahnya biaya jasa kesehatan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dan tersedianya Puskesmas dan Rumah Sakit yang memberikan fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah dengan melalui BPJS Kesehatan.

Disamping itu semenjak Tahun 2017 sudah beroperasi beberapa Rumah Sakit dan Klinik-klinik kesehatan sebagai respon atas semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan. Bahkan pada segmentasi tertentu, sudah mulai bermunculan klinik-klinik kecantikan untuk melayani pasien wanita yang pada saat ini keberadaannya sangat dibutuhkan. Dengan demikian diprediksi untuk Tahun 2019 dan selanjutnya akan terjadi peningkatan sektor ini sebesar 0,05% – 0,07%.

4.1.17. Lapangan Usaha Sektor Jasa Lainnya

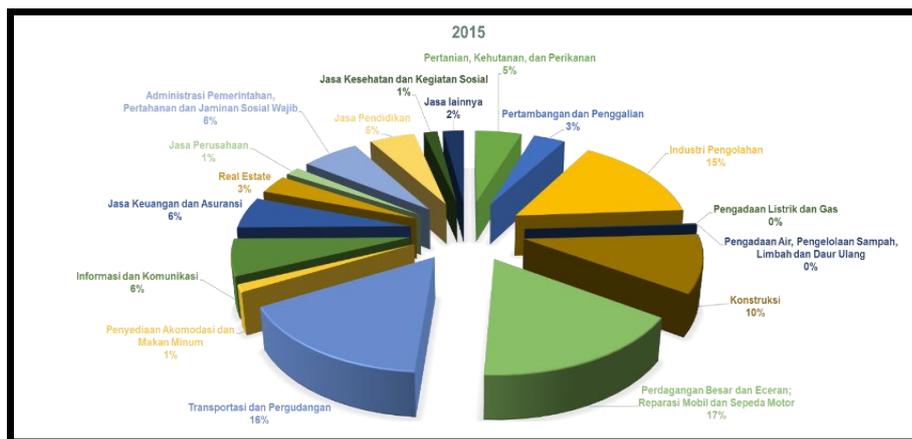
Sektor jasa lainnya merupakan salah satu sektor lapangan usaha yang terus mengalami percepatan di Kota Padang, walaupun kontribusinya terhadap PDRB tidak terlalu besar dan berkisar selama periode 2014 – 2019 adalah 2,5%. Pada Tahun 2014 kontribusi sektor ini terhadap PDRB adalah 2,16%. Terjadi peningkatan sebesar 0,15% pada Tahun 2015 dan peningkatan ini terus terjadi pada Tahun 2016 menjadi 2,44%. Pada Tahun 2018 angka pada sektor Jasa Lainnya mencapai 2,73%. Diprediksi angka ini akan terus meningkat pada tahun berikutnya sebesar 0,14 – 0,16%.

Peningkatan kontribusi sektor jasa lainnya salah satunya disebabkan karena semakin baiknya tingkat pelayanan yang diberikan oleh sektor jasa di Kota Padang, yaitu pelayanan yang diberikan aparatur pemerintahan dan banyaknya sektor jasa yang berdiri di Kota Padang, seperti koperasi, lembaga keuangan non bank yang mempunyai tingkat bunga yang rendah untuk pelaku usaha atau UMKM dan sebagainya. Perkembangan sektor jasa lainnya di Kota Padang Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 5.



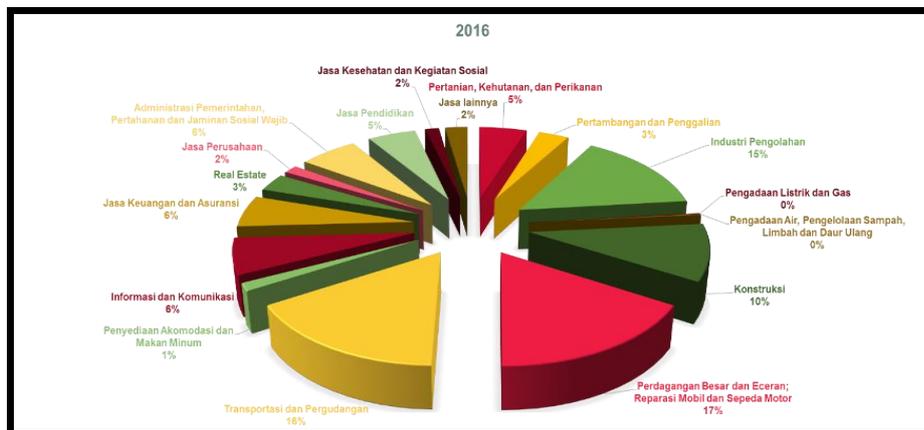
Sumber : Diolah Tahun 2019

Gambar 1. Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014



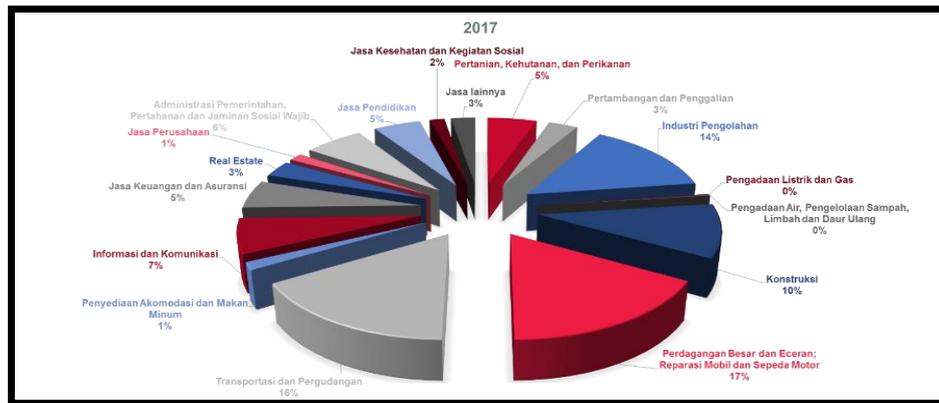
Sumber : Diolah Tahun 2019

Gambar 2. Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015



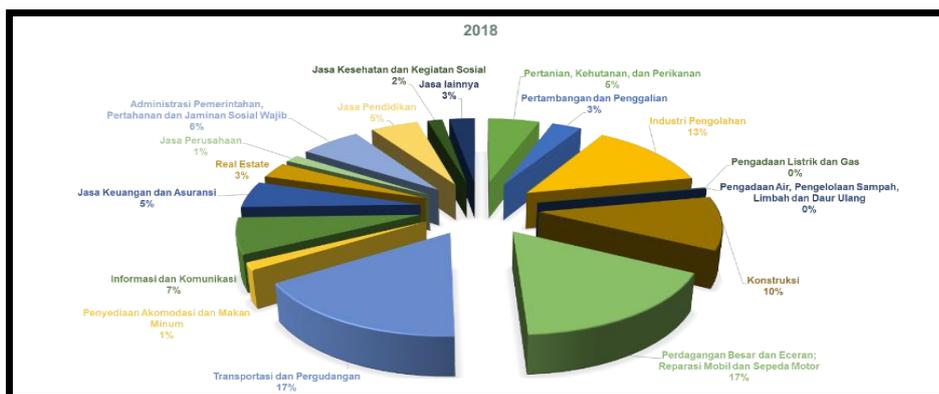
Sumber : Diolah Tahun 2019

Gambar 3. Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016



Sumber : Diolah Tahun 2019

Gambar 4. Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017



Sumber : Diolah Tahun 2019

Gambar 4. Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Padang kedepannya diperlukan analisis terhadap PDRB Kota Padang lima tahun terakhir, yaitu tahun 2014-2018. Menurut data dari BPS Kota Padang (2019) terdapat fluktuasi pertumbuhan PDRB Kota Padang selama tahun 2014-2018. Untuk itu diperlukan analisis apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi terhadap PDRB Kota Padang selama lima tahun tersebut. Hasil

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Padang tahun 2018 didominasi oleh 4 sektor yang dilihat dari distribusi prosentasi PDRB 2018, yaitu ; sektor Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,91%), sektor Transportasi dan Pergudangan (16,73%), sektor Industri Pengolahan (13,12%) dan sektor Konstruksi (10,38%). Keempat sektor ini menyumbang 57,14% dari total PDRB 2018 yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kota Padang 6,09%. Sedangkan sektor kelima yang berkontribusi terbesar pada PDRB Kota Padang adalah sektor Informasi dan Komunikasi yang mengalami perkembangan dengan percepatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan ketersediaan fasilitas pendukung seperti internet, membuat sektor ini menjadi salah satu sektor yang mengalami percepatan yang tinggi walau kontribusinya terhadap PDRB hanya 6,97%.

Pertumbuhan kelima sektor prioritas di Kota Padang yang mendominasi diiringi dengan perkembangan sektor non prioritas yang cukup baik. Walaupun memberikan kontribusi yang tidak besar, namun tetap menjadi sektor yang mendukung dalam perkembangan PDRB Kota Padang selama periode lima tahun yaitu Tahun 2014 – 2018.

5.2 Saran

Dalam menciptakan pembangunan yang seimbang, Pemerintah Kota Padang tidak hanya memfokuskan pengembangan pembangunan pada lima sektor prioritas saja, namun harus memfokuskan pada sektor non prioritas yang dapat menjadi sektor pendukung dalam peningkatan PDRB Kota Padang kedepannya. Pembinaan melalui penanaman modal/investasi yang dilakukan pada setiap sektor non prioritas adalah salah satu cara dalam memperbaiki perkembangan PDRB Kota Padang yang lebih baik.

Artikel ini belum meneliti perkembangan PDRB di Kota Padang menurut harga konstan, sehingga belum diketahui tingkat pertumbuhan Kota Padang selama lima pada periode 2014 – 2018. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada hal ini agar diketahui pada tingkat angka berapa pertumbuhan Kota Padang selamakurun waktu lima tahun, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Afrizal. 2013. *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011*. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Padang Dalam Angka Tahun 2019*. BPS Kota Padang.
- Mankiw, N. Gregory, 2006. *Teori Ekonomi Makro*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mubarq, Mohammad Rizal., Remi, Sutyastie S., Muljarjadi, Bagdja. (2013). *Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Indonesia Tahun 2007-2010*. Jurnal Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran. Diperoleh tanggal 04 Mei 2019 dari <http://pustaka.unpad.ac.id>
- Mudrajad, Kuncoro. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Putri, H. P., & Poerwono, D. (2013). *Faktor Internal dan Faktor Eksternal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2010*. JEJAK , 1-10.
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012, 8(1), 88–99. Dari <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>
- Rahmawati, Nur Indah. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*, Skripsi. Diperoleh tanggal 17 Mei 2019 dari <http://eprints.undip.ac.id/22587/1/>
- Sjafrizal. 2018. *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Rajawali Press.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.